

Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus *East Asian Miracles*

Cristine Natalia

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan

E-mail: zcristine@yahoo.com

Abstrak: Sistem demokrasi liberal dan kapitalisme merupakan dua persyaratan penting, yang diterima secara global, untuk mengakomodasi terjadinya pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Hal ini merupakan suatu pelajaran yang diambil dari negara-negara Barat yang maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat. Bagaimana pun, wilayah Asia Timur/Tenggara menjadi unik bagi penulis karena ia mendapati adanya suatu anomali di dalam keterkaitan antara tipe rezim/pemerintahan yang diadopsi suatu negara dengan pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. Penulis menggunakan kasus Singapura, Korea Selatan, dan Jepang sebagai contoh dari anomali antara keterkaitan tipe rezim dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Timur/Tenggara untuk mengkaji topik ini secara lebih mendalam. Dari studi kasus yang dipaparkan di dalam makalah, penulis menyimpulkan bahwa secara esensial, bukanlah bentuk atau tipe rezim yang diadopsi oleh suatu negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan ekonomi, tetapi unit-unit kebijakan yang bersifat suportif bagi pembangunan (baik di dalam rezim otoriter atau liberal) yang diterapkan yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara bersangkutan.

Kata Kunci: Pembangunan ekonomi, Asia Timur, Asia Tenggara, Rezim otoriter, Demokrasi.

Abstract: Liberal democracy and capitalism are two essential requirements, globally accepted, to accommodate the development of developing countries. This is a lesson, learned from developed countries in the West such as the United States and countries in the western Europe. However, the region of (South)East Asia is unique to the author for she indicated an anomaly in the relation between the type of regime, adopted by a country, and its economic development. The author uses the case of Singapore, South Korea, and Japan as examples of this anomaly that she has indicated before, which happened in the relation between the type of regime and the economic development in (South)East Asia region to study this topic deeper. From the case studies, described in the paper, the author concludes that essentially, it is not the form or type of regime that directly affect the economic development, but the applied supportive policy units (both authoritarian and liberal regime) which can affect the development of economy significantly.

Keywords: economic development, East Asia, Southeast Asia, Authoritarian Regime, Democracy.

Pendahuluan

Di dalam makalah ini, penulis berusaha mengidentifikasi keterkaitan antara tipe rezim yang dianut oleh suatu negara dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di dalam negara tersebut. Penulis akan memfokuskan diri kepada pembangunan ekonomi di delapan negara kekuatan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Tenggara yang kemudian membentuk sebuah kelompok ekonomi regional yang diberi sebutan "*East Asian Miracles*".

Sebagai langkah pertama sebelum

mendiskusikan lebih lanjut mengenai topik ini, penulis harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang ia pahami dengan sebutan "rezim". Istilah "rezim" yang dimengerti oleh penulis merujuk pada sebuah sistem atau cara yang telah diperintahkan untuk melakukan sesuatu; sebuah sistem pemerintahan, khususnya yang bersifat otoriter.¹

¹ Oxford Dictionaries, 'Definition of "regime" in English', <<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/regime>>, viewed on November 3, 2013. Selain itu, kata "otoriter" merujuk kepada sebuah sistem pemerintahan yang memaksakan kepatuhan yang ketat kepada masyarakat terhadap

Sistem demokrasi liberal dan kapitalisme² merupakan dua persyaratan penting, yang diterima secara global, untuk mengakomodasi terjadinya pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. “Demokrasi liberal” merupakan sebuah frasa yang merujuk kepada sistem politik yang berusaha untuk: (a) melindungi dan meningkatkan kebebasan-kebebasan sipil terhadap gangguan pemerintah, institusi, atau elit-elit yang berkuasa di dalam masyarakat; (b) membatasi dan meregulasi intervensi pemerintah di dalam kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, dan moral yang berkenaan dengan kewarganegaraan; (c) meningkatkan jangkauan kebebasan intelektual, politik, dan beragama yang ditujukan untuk warga negara; (d) bersikap skeptis terhadap berbagai permintaan elit-elit yang berusaha mencari hak-hak istimewa tertentu; (e) membangun sebuah masyarakat yang terbuka terhadap bakat dimana anggota-anggota di dalamnya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih penghargaan berdasarkan usaha yang diberikan, bukan berdasarkan status; (f) menyusun seperangkat peraturan yang

dapat memaksimalkan kesejahteraan bersama.³ Hal ini merupakan suatu pelajaran yang diambil dari negara-negara Barat yang maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat. Pemikiran yang diberikan oleh pandangan kapitalisme adalah untuk meningkatkan kinerja pasar yang mana kemudian akan meningkatkan perekonomian suatu negara dengan ketiadaan intervensi dari pemerintah. Kapitalisme merupakan sistem pasar yang akan paling efektif diterapkan suatu negara apabila dibarengi dengan rezim demokrasi liberal. Bagaimana pun, kita tidak dapat mengabaikan kemunculan kekuatan-kekuatan ekonomi di Asia, khususnya Asia Timur dan Tenggara yang pembangunan ekonominya menonjol dibandingkan dengan wilayah lain. Tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi yang menonjol secara regional, tetapi negara-negara ini kemudian masuk ke dalam kategori negara maju di dalam skala global.

Asia Timur dan Tenggara dipilih oleh penulis karena kawasan ini memiliki rekor yang luar biasa atas pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Tetapi dari sekian banyak negara di Asia,

penguasa, yang lazimnya mengorbankan kebebasan-kebebasan individual dari anggota masyarakat yang bersangkutan. Oxford Dictionaries, 'Authoritarian', <<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/authoritarian>>, diakses 15 Oktober 2014.

² “Kapitalisme” merujuk kepada sebuah sistem ekonomi-politik dimana kontrol atas kegiatan tukar menukar (perdagangan) dan industri tidak dipegang oleh pemerintah tetapi oleh pemilik swasta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit). Oxford Dictionaries, 'Capitalism' <<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/capitalism>>, diakses 15 Oktober 2014.

³ “Demokrasi liberal” lazim digunakan untuk merujuk kepada sistem demokrasi yang dianut negara-negara yang berorientasi “Barat” seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Inggris. Demokrasi liberal dikenal juga dengan sebutan “demokrasi konstitusi” atau “demokrasi borjuis”. Australian Politics, 'Liberal Democracy', australianpolitics.com <<http://australianpolitics.com/democracy-and-politics/key-terms/liberal-democracy>>, diakses 15 Oktober 2014.

hampir keseluruhan dari pencapaian ini hanya terjadi pada delapan negara di kawasan Asia Timur/Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang “ajaib” yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “*East Asian Miracles*”.⁴ Delapan negara ini dalam “*East Asian Miracles*” ini lazim disebut sebagai “*High Performing Asian Economies*” (HPAEs) yang mana berarti negara Asia yang memiliki perekonomian berkinerja tinggi. Adapun negara-negara ini terdiri dari Jepang, empat Macan Asia (Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Taiwan), serta tiga negara ekonomi industri baru di kawasan Asia Tenggara yang tergabung ke dalam ASEAN (Indonesia, Malaysia, dan Thailand). Sejak tahun 1960, berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Dunia, delapan negara HPAEs, yang telah disebutkan, telah bertumbuh secepat lebih dari dua kali pertumbuhan yang dialami oleh negara-negara lainnya yang berada di kawasan, kurang lebih tiga kali lebih cepat daripada kawasan Amerika Latin dan Asia Selatan, serta lima kali lebih cepat dari kawasan Afrika Sub-Sahara.⁵

Walaupun demikian, dari kedelapan negara yang termasuk ke dalam kategori “*East Asian Miracles*”, penulis hanya

mengambil tiga studi kasus yaitu Jepang⁶ yang memeluk rezim pemerintahan otoriter, Korea Selatan⁷ yang memeluk rezim pemerintahan demokrasi, dan Singapura⁸ yang masuk ke dalam kategori hybrid.

Gambar 1. Kawasan Asia Timur dan Tenggara⁹



Kekuatan-kekuatan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Tenggara ini memiliki cakupan kerangka kebijakan yang luas; dimulai dari sistem pasar bebas yang hampir sempurna yang diterapkan oleh Hong Kong hingga rezim kebijakan yang sangat selektif yang diadopsi oleh Jepang dan Korea Selatan. Kemudian, apa yang menjadi perhatian di dalam kasus ini adalah fakta bahwa sebagian besar dari negara-

⁴ John Page, 1994, 'The East Asian Miracle: Four Lessons for Development Policy', in The National Bureau of Economic Research, NBER Macroeconomics Annual 1994, Vol. 9, MIT Press, pp. 219.

⁵ Martinussen, J., 1997, *Society, State & Market: A Guide to Competing Theories of Development*, London, pp. 269.

⁶ In 2014, Japan is ranked as the 4th richest country in the world based on GDP and 28th based on GDP per capita. World's Richest Countries, 'Richest Nations' <<http://www.worldsrichestcountries.com/>>, diakses 15 Oktober 2014.

⁷ In 2014, South Korea is ranked as the 13th richest country in the world based on GDP and the 29th based on GDP per capita. Ibid.

⁸ In 2014, Singapore is ranked as the 39th richest country in the world based on GDP and the third richest based on GDP per capita. Ibid.

⁹ Menurut John Page, negara-negara yang termasuk ke dalam East Asian Miracles adalah Jepang, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Walaupun demikian, data yang digunakan di dalam makalah ini berasal dari tahun 1994. Penulis tidak menutup kemungkinan atas berbagai penyesuaian terhadap data yang tersedia.

negara yang telah disebutkan sebelumnya memeluk rezim otoriter¹⁰ yang mana merupakan kontradiksi dari sistem demokrasi liberal dan/atau kapitalisme. Isu ini kemudian mengangkat pertanyaan yang kompleks dan kontroversial perihal hubungan antara pemerintah, sektor swasta/privat, dan pasar di dunia yang mana kemudian membawa penulis ke dalam satu pertanyaan yang akan dicoba untuk dijawab di dalam makalah ini, yaitu: “Adakah pengaruh rezim sebuah negara terhadap pembangunan ekonominya?”

Berdasarkan argumen Martinussen, yang tertulis di dalam bukunya, *Society, State & Market*, sekurang-kurangnya terdapat tiga pandangan berbeda yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi fenomena ini: pandangan neo-klasik, pandangan revisionis, dan pendekatan fungsional.¹¹ Pandangan pada neo-klasik memberi penekanan pada kesuksesan negara kekuatan ekonomi Asia dalam memenuhi dasar-dasar pembangunan ekonomi dengan benar; bahwa negara-negara tersebut menarik/menahan diri dari intervensi atas formasi harga, perdagangan asing, dan fungsi ekonomi dari perusahaan-perusahaan swasta. Bagaimana pun, dalam waktu yang bersamaan, para pemikir neo-klasik mencatat juga bahwa di negara-

negara kekuatan ekonomi Asia Timur/Tenggara ini, pemerintah terlibat aktif dalam menyediakan lingkungan makro ekonomi yang stabil dan kerangka kerja legal yang handal, serta insentif-insentif politik untuk pembangunan industri yang berorientasikan ekspor.¹²

Pandangan kedua diambil dari para pemikir revisionis. Mereka berargumen bahwa di dalam negara kekuatan ekonomi di Asia Timur dan Tenggara, seperti Korea Selatan dan Taiwan, pemerintah melakukan intervensi di dalam sistem ekonomi dengan cara yang kritis dan memanipulasi harga-harga secara sadar untuk meningkatkan pembangunan selektif pada sektor-sektor tertentu. Pemerintah melakukan intervensi dalam artian bahwa mereka akan selalu ada untuk mengatur kontes-kontes yang terjadi di dalam proses ekonomi yang mana nantinya akan berguna untuk menghindari kompetisi yang tidak diperlukan di antara perusahaan-perusahaan lokal. Hal ini akan dibahas di dalam bagian selanjutnya, berkaitan dengan sistem perekonomian yang terjadi di Korea Selatan.

Pandangan terakhir yang disebutkan oleh Martinussen, tetapi tidak kalah penting, adalah pandangan dari pendekatan fungsionalisme. Pendekatan fungsionalisme digunakan oleh World Bank untuk merumuskan dengan lebih baik berbagai

¹⁰ Ohno, K., 2007, 'The East Asian Growth Regime and Political Development', National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

kondisi yang esensial yang diperlukan untuk membangun perekonomian sebuah negara yang berkinerja tinggi, khususnya untuk kasus-kasus yang terjadi di negara-negara Asia dan Afrika. Untuk melakukan campur tangan yang terbaik di dalam sistem pasar, diperlukan interaksi antara dua kelompok pilihan kebijakan, dua metode disiplin yang bersifat kompetitif, tiga buah fungsi sentral dari manajemen ekonomi, yang mana akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

Studi Kasus Singapura

Menjadi contoh sukses dari pembangunan ekonomi di Asia Tenggara selama lebih dari dua dekade, penulis merasa perlu untuk memperhitungkan peran Singapura sebagai salah satu negara kuat di kawasan. Bentuk “halus” dari otoritarianisme yang dianut oleh Singapura menjadi suatu aset bagi negara ini untuk dapat memelihara proses politik internal dan pembangunan ekonomi yang stabil dalam waktu yang bersamaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ralf Dahrendorf tentang Singapura bahwa warga negara, yang patuh pada hukum, yang mengerjakan pekerjaan mereka dengan tekun dan hidup di dalam keadaan pribadi yang tidak bersifat ofensif, tidak perlu takut atas kemurkaan pemimpin mereka, tetapi sebaliknya, mereka yang mengkritisi pemerintah atas kekuasaannya yang tidak

akuntabel, mereka yang menggunakan kebebasan berpendapat untuk mengekspos nepotisme, mereka yang berani menantang pemerintah dengan menempatkan kandidat-kandidat alternatif di dalam pemilihan umum – orang-orang ini berada dalam masalah.¹³ Dari penjelasan yang diberikan Dahrendorf, pemerintah otoriter Singapura memberikan kebebasan pada rakyatnya untuk menjalankan kehidupan pribadi mereka masing-masing dan hal ini berlaku selama rakyat tidak mengganggu atau menjadi ancaman bagi pemerintah dan proses politik. Gangguan yang terjadi yang disebabkan oleh kritik rakyat ini dapat kemudian dikategorikan sebagai kriminalisasi terhadap partai yang sedang memegang kekuasaan yang mana sangat dilarang oleh sistem hukum yang berlaku di Singapura.

Rezim otoriter-kapitalis yang berlaku di Singapura memiliki pengaturan politik yang unik yang membaur dengan kebijakan-kebijakan pada ekonominya. Singapura menggabungkan rasa tidak aman nasional dengan rasa takut yang sifatnya abstrak dan tidak diketahui jelas apa penyebabnya terhadap hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pemerintah.¹⁴ Kombinasi seperti ini telah menjadi kunci dari

¹³ Bell, D. A., 1997, 'A Communitarian Critique of Authoritarianism: The Case of Singapore', *Political Theory*, Vol. 25., No.1., pp 7.

¹⁴ Lingle, C., 1998, 'Singapore and Authoritarian Capitalism', *The Locke Luminary*, Volume 1, No.1, Part 3.

pelaksanaan fobokrasi, atau yang kemudian disebut juga sebagai “Demokrasi ala Asia”. Pemerintah yang menganut prinsip “mengatur dengan rasa takut” dari rezim *People’s Action Party* (Partai Aksi Rakyat) menggabungkan nilai demokrasi barat dengan kumpulan nilai-nilai tradisional Asia tertentu yang bersifat unik.¹⁵ Hal inilah yang kemudian mengklasifikasikan pemerintahan di Singapura ke dalam kelompok “hybrid”.

Lee Kuan Yew, mantan perdana menteri Singapura yang memegang kekuasaan sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1990, berpendapat bahwa pembatasan-pembatasan terhadap hal kebebasan demokratis diperlukan untuk memelihara tradisi komunitas di Singapura.¹⁶ Tradisi komunitas/kelompok dalam latar belakang sejarah Asia merupakan hal yang sulit untuk dilepaskan. Berpindah dari satu identitas ke identitas yang lain akan membutuhkan proses evolusi yang panjang. Lee Kuan Yew menambahkan bahwa apabila Singapura menerapkan model demokrasi Barat, negara ini akan memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi, memiliki lebih banyak ibu tunggal dengan anak-anak yang nakal, lebih banyak obat-obatan terlarang, yang kemudian akan bermuara kepada keadaan ekonomi yang miskin dan semua pencapaian yang telah diraih akan menjadi

suatu hal yang sia-sia. Amerika Serikat mungkin lebih mengutamakan demokrasi daripada ketertiban komunitas, tetapi Singapura akan tetap lebih mengutamakan ketertiban komunitas daripada demokrasi. Hal ini, lagi, diperlukan untuk memelihara proses politik dan ekonomi dengan kinerja tinggi yang stabil dalam waktu yang bersamaan.

Berdasarkan data dari The Heritage Foundation, Singapura mendapat skor rata-rata sebesar 88.0 dan menempati peringkat kedua dunia di dalam index Sepuluh Kebebasan Ekonomi (Ten Economic Freedoms). Sepuluh Kebebasan Ekonomi dapat dibagi ke dalam empat kelompok utama: aturan hukum, pemerintahan yang terbatas, efisiensi peraturan, dan pasar terbuka.¹⁷

Di dalam kelompok pertama, Singapura mendapatkan skor masing-masing sebesar 90.0 untuk unit kebebasan properti dan 92.0 untuk kebebasan dari korupsi. Di dalam aturan hukum Singapura, pengadilan dagang berfungsi secara efisien, tidak ada pengambilalihan kontrak dagang. Singapura menerapkan rezim pengaturan dan pengamanan hak properti intelektual yang paling kuat di Asia. Pemerintah Singapura bersifat anti korupsi dan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Bell, D.A., Loc. cit.

¹⁷ The Heritage Foundation, 2013, 'Singapore Economic Freedom Score', 2013 Index of Economic Freedom, viewed on September 29, 2013<<http://www.heritage.org/index/country/singapore>>.

menerapkan hukum yang tegas untuk kasus suap yang dilakukan oleh warga negaranya, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.¹⁸

Gambar 2. Bagan Kebebasan Ekonomi
Singapura: Rule of Law

| | | | |
|-------------------------|------|---|---|
| Property Rights | 90.0 | — | 📈 |
| Freedom From Corruption | 92.0 | ✓ | 📈 |

Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Di dalam kelompok kedua, Singapura mendapatkan skor masing-masing sebesar 91.3 untuk unit pengeluaran pemerintah dan 91.1 untuk kebebasan fiskal. Singapura menetapkan pajak pendapatan tertinggi di angka 20 persen, sedangkan pajak perusahaan tertinggi di angka 17 persen. Jumlah dari total keseluruhan pajak sama dengan 14.1 persen dari total pendapatan domestik. Sebesar 17 persen dari GDP digunakan sebagai anggaran belanja pemerintah.¹⁹

Gambar 3. Bagan Kebebasan Ekonomi
Singapura: Limited Government

| | | | |
|---------------------|------|---|---|
| Government Spending | 91.3 | — | 📈 |
| Fiscal Freedom | 91.1 | ✓ | 📈 |

Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Pada kelompok ketiga, Singapura mendapatkan skor masing-masing sebesar 97.1 untuk kebebasan berwirausaha, 91.4

untuk kebebasan tenaga kerja, dan 82.0 untuk kebebasan moneter. Secara keseluruhan, sistem regulasi yang berjalan di Singapura merupakan salah satu yang paling efisien dan transparan di dunia. Tanpa membutuhkan batas modal minimal, memulai bisnis di Singapura hanya membutuhkan waktu selama lebih kurang tiga hari. Upah minimum tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi Dewan Upah Nasional memberikan pedoman untuk berbagai penyesuaian atas upah pekerja.

Gambar 4. Bagan Kebebasan Ekonomi
Singapura: Regulatory Efficiency

| | | | |
|------------------|------|---|---|
| Business Freedom | 97.1 | ✓ | 📈 |
| Labor Freedom | 91.4 | ✓ | 📈 |
| Monetary Freedom | 82.0 | ✓ | 📈 |

Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Pada kelompok terakhir, Singapura mendapatkan skor sebesar 90.0 untuk kebebasan berdagang. Hal ini cenderung disebabkan oleh rezim perdagangannya yang bersifat sangat terbuka dan kompetitif, juga oleh ketiadaan pajak yang dikenakan terhadap barang-barang impor. Unit kebebasan investasi diberikan skor sebesar 75.0, hal ini disebabkan oleh kesamaan perlakuan yang diberikan pemerintah terhadap bisnis asing dan domestik, namun perlu dicatat bahwa investasi asing di bidang bisnis pelayanan tetap diberikan batasan. Negara ini mendapatkan skor sebesar 80.0 untuk kebebasan finansial

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

yang tercermin dari keterbukaan pasar domestik terhadap bank-bank asing.

**Gambar 5. Bagan Kebebasan Ekonomi
Singapura: Open Markets**

| | | | |
|--------------------|------|---|---|
| Trade Freedom | 90.0 | — | ↗ |
| Investment Freedom | 75.0 | — | ↗ |
| Financial Freedom | 80.0 | ↗ | ↗ |

Sumber : The Heritage Foundation,
Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Studi Kasus Korea Selatan

Tidak seperti Singapura yang memberikan kebebasan berekonomi kepada rakyatnya, di dalam kasus yang terjadi di Korea Selatan, pemerintah mengeluarkan instruksi langsung yang ditujukan kepada bank dan mengarahkan investasi dengan pemberlakuan kebijakan-kebijakan kredit selektif.²⁰ Pemerintah setuju untuk memisahkan dan memberikan prioritas kepada sektor-sektor dan industri-industri yang menonjol di dalam pertumbuhan ekonomi negara. Sektor-sektor dan industri-industri yang diberikan prioritas ini kemudian ditawarkan “pinjaman kebijakan” berupa tingkat bunga yang jauh lebih rendah dari tingkat bunga normal di pasaran, ditambah dengan bantuan berupa dukungan administrasi dan teknis dari negara. Bagaimanapun, hal ini penulis menggarisbawahi fakta bahwa dasar-dasar dari kesuksesan ekonomi pasar Korea

Selatan diletakkan pertama kali oleh mantan pemimpin otoriter Park Chung Hee dan Chun Doo Hwan beberapa dekade lalu pada era pasca Perang Dingin; rezim demokrasi di Korea Selatan tidak terjadi hingga pertengahan tahun 1980-an.

Lagi-lagi, berbeda dengan sistem otoriter-kapitalis Singapura, Korea Selatan memeluk sistem demokrasi dalam proses politik tetapi ketika menyentuh perekonomian, pemerintah melakukan intervensi. Walaupun langkah-langkah besar menuju liberalisasi telah diambil pada tahun 1980-an, intervensi, hingga kini, masih terjadi secara sistematis di dalam kompetisi pasar di antara perusahaan-perusahaan; pemerintah memaksa mereka untuk bekerja sama untuk mengelola berbagai sumber daya yang langka. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kontes di dalam proses-proses ekonomi dikelola oleh pemerintah dalam rangka menghindari berbagai kompetisi yang tidak perlu di antara perusahaan-perusahaan nasional. Tingkat intervensionisme yang tinggi di Korea Selatan merupakan hal yang membuat perbedaan dengan apa yang terjadi di Singapura.

Berdasarkan data yang didapat dari The Heritage Foundation, Korea Selatan menempati posisi di peringkat ke-34 dunia dan peringkat ke-8 dari 41 negara di kawasan Asia Pasifik dengan skor rata-rata sebesar 70.3 di dalam Index Negara Ekonomi Bebas pada tahun 2013.

²⁰ Martinussen, J., Op.Cit.

Pada kelompok pertama, Korea Selatan mendapatkan skor masing-masing 70.0 untuk unit hak properti dan 54.0 untuk kebebasan dari korupsi. Aturan hukum dalam negeri Korea Selatan berjalan secara efektif dan memungkinkan sistem yudisial berjalan dengan efisien. Bagaimana pun, perlindungan terhadap hak properti intelektual perlu ditingkatkan. Masalah korupsi masih menjadi masalah yang kerap terjadi: sejak tahun 1990 tujuh orang pemimpin dari grup-grup bisnis raksasa di Korea Selatan telah mendapatkan perintah hukuman penjara selama rata-rata 22 tahun, tetapi perintah hukuman penjara ini terus menerus ditangguhkan.²¹

**Gambar 6. Bagan Kebebasan Ekonomi
Korea Selatan: Rule of Law**

| | | | |
|-------------------------|------|---|---|
| Property Rights | 70.0 | — | ↗ |
| Freedom From Corruption | 54.0 | — | ↗ |

Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Pada kelompok kedua, Korea Selatan mendapatkan skor masing-masing 72.8 di dalam pembelajaran pemerintah serta 73.0 untuk kebebasan fiskal. Pemerintah menetapkan pajak penghasilan tertinggi sebesar 35 persen dan pajak perusahaan tertinggi sebesar 22 persen. Anggaran belanja pemerintah setara dengan 30.1 persen dari total output domestik total.

Korea Selatan memiliki surplus yang relatif kecil di dalam neraca anggaran. Utang publik berada stabil di bawah angka 30 persen dari GDP.²²

**Gambar 7. Bagan Kebebasan Ekonomi
Korea Selatan: Limited Government**

| | | | |
|---------------------|------|---|---|
| Government Spending | 72.8 | ↗ | ↗ |
| Fiscal Freedom | 73.0 | ↗ | ↗ |

Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Di dalam kelompok ketiga, Korea Selatan meraih skor sebesar 72.6 untuk kebebasan berdagang serta masing-masing 70.0 untuk kebebasan berinvestasi dan finansial. Kerangka kerja dari regulasi kewirausahaan di Korea Selatan bersifat kompetitif dan memiliki kapabilitas untuk menopang aktivitas dan inovasi wirausaha. Dengan ketiadaan batas minimum modal, hanya diperlukan lima prosedur dan tujuh hari untuk memulai bisnis di negara ini. Pasar tenaga kerja terus bersifat dinamis, walaupun dibatasi oleh kekakuan regulasi pemerintah. Adanya serikat buruh hal ini menjadi risiko tambahan yang harus dipertimbangkan sebelum memulai bisnis di Korea Selatan.²³

²¹ The Heritage Foundation, 2013, 'South Korea Economic Freedom Score', 2013 Index of Economic Freedom, viewed on September 29, 2013 <<http://www.heritage.org/index/country/southkorea>>

²² Ibid.

²³ The Heritage Foundation, op. cit.

**Gambar 8. Bagan Kebebasan Ekonomi
Korea Selatan : Regulatory Efficiency**

| | | | |
|------------------|------|---|---|
| Business Freedom | 93.6 | — | ↗ |
| Labor Freedom | 48.7 | ✓ | ↗ |
| Monetary Freedom | 77.9 | ✓ | ↗ |

Sumber : The Heritage Foundation,
Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Di dalam kelompok terakhir, Korea Selatan meraih skor masing-masing sebesar 72.6 di dalam kebebasan berdagang, 70.0 di dalam kebebasan investasi, serta 70.0 di dalam kebebasan finansial. Korea Selatan mengenakan tarif dagang rata-rata sebesar 8.7 persen, tetapi diperkirakan bahwa tarif ini akan berangsur-angsur diturunkan sehubungan dengan pemberlakuan persetujuan perdagangan bebas di kawasan. Perekonomian Korea Selatan meningkatkan keterbukaan dan transparansinya terhadap investasi asing.²⁴

**Gambar 9. Bagan Kebebasan Ekonomi
Korea Selatan : Regulatory Efficiency**

| | | | |
|--------------------|------|---|---|
| Trade Freedom | 72.6 | — | ↗ |
| Investment Freedom | 70.0 | — | ↗ |
| Financial Freedom | 70.0 | — | ↗ |

Sumber : The Heritage Foundation,
Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Studi Kasus Jepang

Apabila kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II, kita akan kemudian berbicara

tentang berbagai proses panjang dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Jepang untuk memulihkan keadaan ekonomi dalam negeri hingga dapat berkiprah kembali di dalam komunitas ekonomi internasional. Sistem kekaisaran dalam kehidupan politik Jepang jelas mencerminkan bahwa negara ini menganut rezim otoriter; sedangkan di dalam pembangunan ekonomi, pemerintah Jepang menerapkan suatu cara unik yang dapat mendorong ekonomi baik secara makro dan mikro. Pembangunan Ekonomi Jepang (*Japanese Economic Development*), atau biasa disebut sebagai JEM, kemudian disusun oleh para peneliti untuk dapat menganalisis dengan lebih baik pertumbuhan ekonomi Jepang yang ajaib. Di dalam teori JEM, tiap-tiap variabel ekonomi berevolusi melalui tiga tahapan yang tidak akan dibahas lebih jauh di dalam tulisan ini; *the short-run dynamics*, *the short-run equilibrium*, dan *the steady state*. Kesuksesan ekonomi Jepang cenderung disebabkan oleh sejarah yang dialaminya di dalam Perang Dunia II. Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, Jepang harus memulai segalanya dari sisa-sisa kehancuran yang ada. Pertumbuhan ekonomi penting yang pertama di Jepang terjadi pada tahun 1955-1973. Pertumbuhan pada tahun ini mendorong perekonomian di Jepang ke dalam industrialisasi berskala penuh, juga sebagai motor untuk menjadi kekuatan

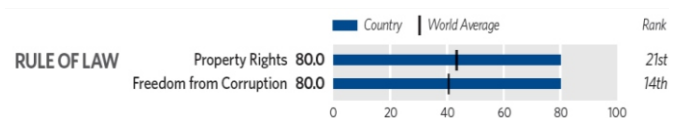
²⁴ The Heritage Foundation, op. cit.

ekonomi terbesar kedua di dunia Barat.²⁵ Jepang berhasil meraih ambisinya dan menjadi negara non-Barat pertama yang sukses dalam industrialisasi. Kesuksesan ekonomi Jepang melahirkan sebuah pelajaran dan/atau model yang patut ditiru bagi negara-negara tetangganya. Walaupun demikian, dilihat dari sudut pandang studi pembangunan saat ini, sejarah perekonomian Jepang memiliki faktor-faktor umum dari pembangunan ekonomi yang lazim; stabilitas ekonomi makro, pembangunan sumber daya manusia, dan tersedianya berbagai infrastruktur ekonomi.²⁶

Walaupun Jepang memiliki jalan uniknya sendiri untuk mencapai kesuksesan pembangunan ekonomi, secara garis besar, strategi pertumbuhan ekonomi Jepang tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan pemerintah Singapura dan Korea Selatan dalam artian bahwa intervensi-intervensi yang dilakukan pemerintah dalam sistem perekonomian terjadi juga di Jepang. Perekonomian Jepang dapat dikatakan mendapat manfaat yang sangat dominan dari tingkat kebebasan ekonomi yang relatif sehat di semua area yang tercermin di dalam aturan Sepuluh Kebebasan Ekonomi (Ten Economic Freedoms).

Berdasarkan data dari Heritage Foundation, di dalam kelompok pertama, peraturan mengenai hukum, Jepang mendapatkan nilai skor 80.0 masing-masing untuk hak properti dan kebebasan dari korupsi.²⁷ Peraturan Jepang mengenai hak properti tersusun dari kerangka kerja yudisial yang solid yang dapat memberikan proteksi atas hak properti riil dan intelektual, bagaimana pun, hal ini terkadang dapat menghabiskan waktu yang lama dan mahal. Sistem peradilan di Jepang bersifat independen dari intervensi-intervensi politik tetapi (sehingga) tingkat efisiensinya menjadi rendah. Pengadilan-pengadilan di Jepang tidak mengenal diskriminasi terhadap para investor asing; pemerintah Jepang menghormati kontrak yang ditandatangani oleh investor asing.

Gambar 10. Bagan Kebebasan Ekonomi Jepang: Rule of Law



Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Di dalam kelompok kedua, Jepang mendapatkan skor yang relatif lebih rendah dari negara-negara lain. Kebebasan fiskal (69.2) dan pengeluaran pemerintah (45.0) menjadikan ukuran utang publik lebih dari dua kali lebih tinggi dari ukuran

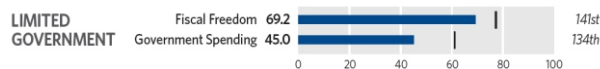
²⁵ Martinussen, J., Op.Cit.

²⁶ Kimura, F., 2009, 'Japan's Model of Economic Development: Relevant and Non Relevant Elements for Developing Economies', Research Paper No. 2009/22, United Nations University, pp. 1.

²⁷ Ibid.

perekonomian Jepang. Pajak pendapatan tertinggi adalah sebesar 40 persen. Pemerintah menurunkan pajak perusahaan hingga tingkat 25.5 persen, tetapi pajak-pajak lokal dapat sewaktu-waktu meningkat secara signifikan. Besarnya beban pajak secara keseluruhan setara dengan 28.8 persen dari besarnya total pendapatan domestik. Besarnya pengeluaran pemerintah adalah sebanyak 42.8 persen dari nilai GDP dengan defisit anggaran yang berada di sekitar batas 10 persen dari nilai GDP.

**Gambar 11. Bagan Kebebasan Ekonomi
 Jepang: Limited Government**

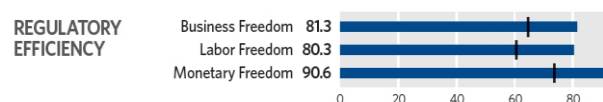


Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Di dalam kelompok efisiensi peraturan, kebijakan-kebijakan Jepang mendapatkan skor yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Kebebasan berbisnis mencapai nilai 81.3, kebebasan buruh dengan nilai 80.3, dan skor sebesar 90.6 untuk kebebasan moneter di dalam negeri.²⁸ Skor-skor yang tinggi yang didapatkan Jepang dapat dikatakan sangat dipengaruhi oleh jumlah prosedur yang relatif lebih sedikit yang diperlukan oleh para pebisnis untuk mendirikan perusahaan-perusahaan; mereka tidak

membutuhkan modal pembangunan minimum. Walaupun demikian, dinamika pertumbuhan kewirausahaan di Jepang terhalang dengan adanya kekakuan berbagai regulasi yang sulit untuk dihapuskan, termasuk ke dalamnya adalah berbagai persyaratan lisensi yang terkadang membebani pembangunan bisnis. Produktivitas dalam negeri secara negatif dipengaruhi juga oleh kecenderungan akan jaminan penempatan kerja seumur hidup dan upah berbasis senioritas. Diskriminasi senioritas di dalam pembangunan kewirausahaan menjadi suatu penghalang atas kebutuhan akan pasar buruh yang fleksibel. Bagaimanapun, inflasi masih berada di dalam batas minimal dengan adanya tingkat produktivitas yang tinggi.

**Gambar 12. Bagan Kebebasan Ekonomi
 Jepang: Regulatory Efficiency**



Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

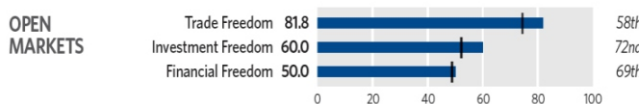
Kelompok terakhir adalah mengenai pasar terbuka. Di dalam kelompok ini, Jepang memiliki skor yang kurang lebih relatif.²⁹ Poin 81.8 untuk kebebasan perdagangan; besar *trade-weighted tariff* atau tarif perdagangan berbobot adalah sebesar 1.6 persen, tetapi ada hambatan perdagangan berlapis yang diterapkan oleh

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

pemerintah Jepang. Untuk kebebasan berinvestasi, negara ini mendapatkan skor sebesar 60.0; investasi asing secara formal diterima dengan tangan terbuka, sedangkan investasi lokal harus tunduk kepada beberapa batasan yang diberikan. Walaupun demikian, ada pemberlakuan atas peraturan yang dianggap berlebihan serta sistem peradilan yang lambat didalam perusahaan-perusahaan domestik yang menjadi penghambat bagi para investor asing. Untuk kebebasan finansial, Jepang mendapatkan skor sebesar 50.0 yang disebabkan oleh adanya pengaruh-pengaruh intervensi politik dari pemerintah terhadap sektor finansial serta kurangnya pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

**Gambar 13. Bagan Kebebasan Ekonomi
Jepang: Open Markets**



Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Kesimpulan

Mitos tentang perekonomian berkinerja tinggi di negara-negara Asia Timur dan Tenggara, bagi penulis, bukanlah merupakan sebuah misteri setelah dilakukan peninjauan lebih dalam atas kasus-kasus yang terjadi. Negara-negara di Asia Timur dan Tenggara sepertinya tidak akrab dengan sistem demokrasi, khususnya yang bersifat liberal, tetapi mereka mampu

membangun perekonomian mereka dengan sukses. Para pemimpin otoriter di negara-negara kekuatan ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya cenderung untuk melakukan intervensi pada tingkat yang tinggi, yang berbeda dengan intervensiisme yang dilakukan di Asia Selatan dan Afrika. Pada kasus-kasus yang lebih tua, penekanan terletak pada ketersediaan sebuah kerangka kebijakan untuk mengatur kompetisi, pertumbuhan dan ekspor di dalam suatu negara, sedangkan pada kasus-kasus yang belakangan terjadi, penekanan terletak pada batasan-batasan dan kontrol terhadap ekonomi. Peran yang dimainkan pemerintah dalam kasus *East Asian Miracle* adalah sebagai wasit dalam kondisi yang disebut sebagai kontes yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan terutama yang bersifat lokal. Bagaimana pun, penulis juga mencatat bahwa di dalam kasus *East Asian Miracle*, terdapat prasyarat yang tidak ditemukan di negara-negara berkembang lainnya, khususnya yang berkaitan dengan sejarah kebangsaan. Sebagai tambahan, bentuk intervensi yang dilakukan para pemerintah di Timur Jauh cenderung bersifat *market-friendly*.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa sebenarnya tipe rezim tertentu tidak berhubungan, setidaknya secara langsung, dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Sebagaimana telah

disebutkan oleh Przeworski bahwa bukanlah “rezim”, melainkan “kebijakan” yang memberikan perbedaan-perbedaan yang relevan di dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Rezim otoriter mutlak mungkin saja lebih tidak disukai oleh lebih banyak masyarakat, tetapi sedikit porsi dari demokrasi di dalam proses politik dengan pemimpin otoriter telah terbukti efektif dalam pembangunan ekonomi negara-negara *East Asian Miracles*. Sistem kepemimpinan otoriter tidak berarti bahwa sang pemimpin harus selalu menjadi seorang tiran; menjadi sesosok figur yang penuh kebajikan (*benevolent father*) merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh pemimpin dalam sistem rezim otoriter.

REFERENCES

BOOK

- Balaam, David N. and Michael Veseth, 2001, *Introduction to International Political Economy*, Second Edition, Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
- Garnaut, Ross and Peter Drysdale, 1994, *Asia Pacific Regionalism: Readings in International Economic Relations*, Harper Educational Publisher, New South Wales.
- Martinussen, John, 1997, *Society, State & Market: A Guide to Competing Theories of Development*, Zed Books, Ltd., London.
- Page, John, 1994, 'The East Asian Miracle: Four Lessons for Development Policy' in the National Bureau of Economic Research, NBER Macroeconomics Annual 1994, Vol. 9, MIT Press, pp. 219-282.
- Przeworski, Adam and Fernando Limongi, 1993, 'The Journal of Economic Perspectives, 'Political Regimes and Economic Growth', Volume 7, American Economic Association <<http://www.jstor.org/stable/2138442>>, viewed on September 16, 2009.
- Stiglitz, Joseph E., Jean P. Fitoussi, and Amartya Sen, 2010, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. <http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf>, viewed on August 21, 2013.

Jurnal and Website

- Bell, Daniel A., 1997, 'A Communitarian Critique of Authoritarianism: The Case of Singapore', *Political Theory*, Volume 25, No.1, pp 6-32. Sage Publication, Inc. <<http://www.class.uh.edu/faculty/tommers/Open%20and%20Closed%20Societies/communitarian%20challenge%20case%20of%20singapore.pdf>>, viewed on September 28, 2013.
- Kimura, Fukunari, 2009, 'Japan's Model of Economic Development: Relevant and Non Relevant Elements for Developing Economies', Research Paper No. 2009/22, United Nations University.
- Lingle, Christopher, 1998, 'Singapore and Authoritarian Capitalism', *The Locke Luminary*, Volume 1, No.1, Part 3. <http://www.thelockeinstitute.org/journals/luminary_v1_n1_p3.html>, viewed on September 28, 2013.
- The Heritage Foundation, 2013, 'Japan Economic Freedom Score', 2013 Index of Economic Freedom <<http://www.heritage.org/index/countr>

y /japan>viewed on September 29, 2013.

The Heritage Foundation, 2013, 'Singapore Economic Freedom Score', 2013 Index of Economic Freedom. <<http://www.heritage.org/index/country/singapore>>, viewed on September 29, 2013.

The Heritage Foundation, 2013, 'South Korea Economic Freedom Score', 2013 Index of Economic Freedom. <<http://www.heritage.org/index/country/southkorea>>, viewed on September 29, 2013.